

Radikalisme dalam Masyarakat Multikultural: Ancaman Lokal dan Tantangan Global

Margaretha Hanita

Abstrack

Radicalism is a destructive notion, when it turns into violence can be very extreme: atrocities, cruelty and inhumanity to achieve the political goals and ideology of the group. Radicalism was first used in national revolutions such as the French Revolution and the Bolsevic Revolution in Russia, or the Cultural Revolution in China, then used in the national liberation struggle against colonial and national liberation movements like the Kurds, Tamil Tigers and movements national liberation in Latin America. Radicalism today became the notion used in religious-based and ideological terrorist movements. The development of forms, types, tactics and strategies of radicalism is very rapid. The method of its dissemination and process of group and individual radicalization involves various means and means in society, including using modern world products. Radicalism not only develops in monocultural society but also develops in multicultural society. Radicalism poses a threat to every country in the world and becomes a global challenge considering the radicalism that has become active in terrorism has spread all over the world, from Europe to Asia, from America to Australia and Africa, from the Middle East to the rest of the world. Geopolitics is one way to counteract and suppress radicalization and radicalism.

Keywords: radical, terrorism, cross-border terrorism, geopolitics.

Pengantar

Radikalisme merupakan aliran yang destruktif. Ketika berubah menjadi kekerasan bisa menjadi sangat ekstrem: kekejian, kekejaman dan tidak berperikemanusiaan untuk mencapai tujuan-tujuan politik dan ideologi kelompoknya. Radikalisme mula-mula digunakan dalam revolusi nasional seperti Revolusi Prancis dan Revolusi Bolshevik di Rusia, atau Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, kemudian digunakan dalam perjuangan pembebasan nasional melawan kolonial misalnya di Indonesia ketika itu, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional seperti dilakukan suku bangsa Kurdi, Macan Tamil, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional di berbagai belahan dunia, dari Eropa, Afrika, Asia hingga Amerika Latin. Radikalisme dewasa ini menjadi aliran yang digunakan dalam gerakan-gerakan terorisme berbasis agama dan ideologi. Perkembangan bentuk, tipe, taktik dan strategi radikalisme sangat pesat. Metode penyebarannya dan proses radikalisasi kelompok dan individu menggunakan berbagai cara dan sarana

yang ada dalam masyarakat, termasuk menggunakan produk-produk dunia modern. Radikalisme tidak hanya berkembang di masyarakat monokultural tapi juga berkembang di masyarakat multikultural. Radikalisme menjadi ancaman setiap negara di dunia dan menjadi tantangan global mengingat radikalisme yang menjelma aktifitasnya menjadi terorisme, sudah menjalar ke seluruh dunia, dari Eropa ke Asia, dari Amerika ke Australia dan Afrika, dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Paper ini akan membahas sumber-sumber radikalisme, sejarah, adaptasi dan metamorfosenya dalam masyarakat multikultural.

Apa yang dimaksud radikalisme?

Radikalisme mula-mula digunakan dalam revolusi nasional seperti Revolusi Prancis dan Revolusi Bolshevik di Rusia, atau Revolusi Kebudayaan di Tiongkok, kemudian digunakan dalam perjuangan pembebasan nasional melawan kolonial misalnya di Indonesia dan gerakan-gerakan

pembebasan nasional seperti dilakukan suku bangsa Kurdi, Mavan Tamil, dan gerakan-gerakan pembebasan nasional di Amerika Latin. Radikalisme dewasa ini menjadi aliran yang digunakan dalam gerakan-gerakan terorisme berbasis agama dan ideologi. Perkembangan bentuk, tipe, taktik dan strategi radikalisme sangat pesat. Metode penyebarannya dan proses radikalisasi kelompok dan individu menggunakan berbagai cara dan sarana yang ada dalam masyarakat, termasuk menggunakan produk-produk dunia modern.

Radikalisme dalam Revolusi Sosial dan Politik

Radikalisme yang sekarang ini menjadi populer di Indonesia merujuk pada gerakan radikalisme yang muncul dalam gerakan-gerakan Islam Global seperti Hizbut Tahrir yang memperjuangkan kekhalifahan dunia, dan yang lebih ekstrem merujuk pada aksi-aksi terorisme di Indonesia yang dijalankan oleh sel-sel organisasi-organisasi jihadis yang berafiliasi pada ISIS. Pemerintah Indonesia merespon gerakan radikalisme Hizbut Tahrir Indonesia dengan melarang organisasi ini, karena cita-cita gerakan Hizbut Tahrir Indonesia adalah meniadakan Indonesia dan menggabungkan wilayah Indonesia ke dalam wilayah kekhalifahan dunia. Aksi-aksi terorisme yang semakin massif dengan melibatkan anggota keluarga untuk melancarkan aksi pengeboman bunuh diri, direspon negara dengan merevisi Undang-Undang anti Terorisme yang lebih keras dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pelibatan TNI menunjukkan bahwa aksi-aksi radikal dengan kekerasan sudah berada di titik yang membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Tapi apa sebenarnya gerakan radikal itu? Bagaimana sejarahnya? Teori-teorinya? Gerakan radikal sudah lama dikenal di dunia Barat. Studi-studi tentang gerakan sosial, mendefinisikan gerakan radikalisme sebagai "tantangan kolektif, berdasarkan pada tujuan umum dan solidaritas sosial, dalam interaksi berkelanjutan dengan elit, penentang, dan pihak berwenang" (Tarrow 1998: 4), cenderung berfokus pada bentuk demokrasi dan barat tertentu dalam model politik yang dikenal pada 1960-an, kasus

seperti gerakan-gerakan hak-hak sipil, gerakan perempuan, dan protes anti-perang Vietnam. Para peneliti gerakan revolusi juga melihat gerakan radikal digunakan dalam kasus-kasus revolusi terkenal seperti Perancis pada 1789, Rusia pada 1917, Kuba pada 1959, dan Nikaragua pada 1979. Juga studi tentang gerakan nasionalis-kelompok separatis abad kedua puluh.¹

Apa yang terjadi pada revolusi-revolusi tersebut di atas dan gerakan-gerakan sosial di Barat cenderung menggunakan metode radikalisme untuk mencapai tujuan-tujuannya. Pada 1990an para peneliti gerakan sosial justru tidak menaruh minat pada kajian-kajian gerakan radikalisme Islam yang mulai tumbuh di Timur Tengah, negara-negara Islam lain di Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Mereka justru sedang menaruh minat pada apa yang mereka sebut Gerakan Sosial Baru seperti Dough McAdam, Enrique Larana, Sidney Tarrow, dan Charles Tilly, misalnya bisa dilihat dari buku Enrique Larana et.al., *New Social Movements: From Identity to Ideology*, Philadelphia, Temple University Press, 1994. Enrique Larana menggambarkan gerakan sosial baru memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mentransendensikan struktur kelas; (2) memperlihatkan kemajemukan gagasan dan nilai-nilai; (3) memfokuskan pada isu-isu budaya simbolik yang lebih terkait dengan identitas daripada ekonomi; (4) hubungan antar individu dan ekonomi kabur; (5) melibatkan segi-segi pribadi dan keakraban kehidupan manusiawi; (6) mengandalkan semangat anti-kekerasan dan pembangkangan sipil; (7) berkaitan dengan adanya krisis kredibilitas dan ruang partisipasi; (8) cenderung tersegmentasi, kabur dan terdesentralisasi.²

Pada tahun-tahun itu, studi gerakan radikal dilakukan oleh Della Porta (1995)³ tapi fokusnya pada kaum radikal militan dalam berbagai gerakan kiri di Italia dan Jerman. Bela menemukan kaum radikal

¹ Beck, Colin J. (2015) *Radicals, Revolutionaries, and Terrorists*, halaman 4. Polity Press

65 Bridge Street Cambridge CB2 1UR, UK

² Enrique Larana (1995) et.al., *op.cit.*, halaman 39-43.

³ Della Porta (1995), Donatella, *Social Movements, Political Violence, and the State: A Comparative Analysis of Italy and Germany* (Cambridge: Cambridge University Press).

kiri di Barat itu terikat bersama oleh ikatan pribadi yang kuat, serta oleh pengalaman aktivis mereka yang sama. Della Porta menemukan bahwa berpartisipasi dalam aksi-aksi radikal memperkuat dan memfasilitasi masa depan. partisipasi dalam aksi serupa, yang bertindak sebagai mekanisme penguatan diri untuk mendorong aktivis radikal menjadi semakin radikal. Ilmuwan sosial lainnya, Cross memperluas pandangan Della Porta dengan memeriksa dua gerakan sosial akar rumput. Cross menemukan bahwa sementara teori radikalisasi Della Porta, dalam banyak hal, menegaskan, ada faktor-faktor struktural dan psikologis yang memengaruhi perkembangan identitas radikal. Proses-proses ini sangat dipengaruhi bukan hanya bagaimana radikal berinteraksi dengan sesama aktivis dan radikal, tetapi juga kesediaan mereka untuk melihat kekerasan sebagai strategi politik yang aktif.⁴

Gerakan Radikal dalam Revolusi Politik dan Sosial

Studi-studi tentang gerakan revolusi, baik revolusi sosial maupun revolusi politik, selalu merujuk pada radikalisme, yang dalam hal ini mengubah suatu tatan sampai ke akarnya. Akar kata radikalisme adalah akar. Studi revolusi yang dilakukan oleh *Theda Skocpol*⁵ dalam peristiwa *Revolusi Prancis, Rusia dan China menunjukkan kesamaan, yakni dijalankan oleh gerakan petani dan elite politik radikal penentang pemerintahan monarki. Gerakan revolusioner ini berhasil mengubah secara radikal Prancis, Rusia dan China dengan gerakan radikal. Dua gerakan revolusi: Rusia dan China diilhami oleh pemikiran-pemikiran radikal Karl Marx tentang hubungan buruh (kaum proletar termasuk petani) dengan negara. Theda Skocpol*

⁴ Remy Cross dan David A. Snow "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types." *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 (2012): : 115-130.

⁵ Theda Skocpol (1979), *States and Social Revolutions : A Comparative Analysis of France, Russia, and China*, Paper Back; atau Theda Skocpol, "State and Revolution, Old Regimes and Revolutionary Crisis in France, Russia, and China" dalam *Theory and Society* Vol.7, No. ½, Special Double Issue on State and Revolution (Jan-Mar., 1979) pp. 7-95.

juga menganalisis tiga gerakan revolusi tersebut dengan analisis Marxis. Skocpol menulis:

Teoris Marxis klasik tidak secara analitis mendekati negara dan masyarakat. Kaum Marxis melihat tatanan masyarakat yang didasarkan pada konflik dan dominasi kelas. Kekuasaan negara adalah jenis kekuasaan khusus dalam masyarakat, tidak setara dengan semua kekuatan kelas dominan. Apapun variasinya dalam bentuk historisnya, negara seperti itu dilihat sebagai ciri semua kelas yang terbagi mode produksinya, di mana salah satu fungsi yang diperlukan dan tak terhindarkan adalah mengandung konflik kelas dan untuk melaksanakan kebijakan lain dalam dukungan dominasi surplus-apropriasi dan kepemilikan properti kelas. Dengan demikian, baik dalam Marxisme klasik maupun dalam teori aksi kolektif Charles Tilly, negara diperlakukan sebagai struktur otonom, dengan logika dan kepentingannya sendiri belum tentu setara dengan, atau menyatu dengan, kepentingan yang dominan kelas dalam masyarakat atau tatanan lengkap kelompok anggota dalam pemerintahan. Ini adalah konsekuensi yang hampir mustahil dalam ketentuan teori-teori ini bahkan untuk menaikkan kemungkinan bahwa konflik kepentingan yang mendasar mungkin timbul antara kelas atau sekumpulan kelompok dominan yang ada, di satu sisi, dan para penguasa negara di sisi lain. Masyarakat dicirikan oleh dominasi dan kekuasaan antarkelompok perjuangan, dan negara, berdasarkan pada alat pemaksaan yang terkonsentrasi, cocok sebagai suatu bentuk dominasi instrumental atau obyektif dan sebagai objek perjuangan".⁶

⁶ Theda Skocpol, "State and Revolution, Old Regimes and Revolutionary Crisis in France, Russia, and China" dalam *Theory and Society* Vol.7, No. ½, Special Double Issue on State and Revolution (Jan-Mar., 1979) halaman 9.

Struktur negara, kekuatan internasional, dan hubungan kelas: menurut Theda Skocpol menunjukkan bagaimana ketiganya bergabung untuk menjelaskan asal-usul dan pencapaian transformasi sosial-revolusioner. Revolusi sosial jarang terjadi tetapi tidak dapat disangkal memiliki arti yang sangat penting dalam sejarah dunia modern. Negara dan Revolusi Sosial menyediakan kerangka acuan baru untuk menganalisis penyebab, konflik, dan hasil dari revolusi tersebut. Ini mengembangkan analisis historis komparatif ketat dari tiga kasus besar: Revolusi Perancis 1787 hingga awal 1800-an, Revolusi Rusia 1917 hingga 1930-an, dan Revolusi Cina 1911 hingga 1960-an. Percaya bahwa teori-teori revolusi yang ada, baik Marxis maupun non-Marxis, tidak cukup untuk menjelaskan pola-pola revolusi aktual, Skocpol mendesak kita untuk mengadopsi perspektif baru. Di atas segalanya, ia berpendapat bahwa negara-negara yang dikonsepsikan sebagai organisasi administratif dan koersif yang berpotensi otonom dari kontrol kelas dan kepentingan harus dijadikan pusat untuk penjelasan tentang revolusi.

Dalam literatur teoretis tentang revolusi, seseorang menemukan versi-versi ini ide-ide tentang negara dan masyarakat terutama dalam argumen-argumen deprivasi relatif Ted Gurr dan teori Sistem Chalmers Johnson. Untuk mereka, apa yang penting untuk menjelaskan pecahnya revolusi adalah apakah yang ada otoritas pemerintah kehilangan legitimasi mereka; dan ini terjadi ketika secara sosial massa yang tidak puas atau mengalami disorientasi akan merasa bahwa hal itu dapat diterima untuk terlibat dalam kekerasan, atau berubah menjadi nilai-nilai baru yang dimiliki oleh revolusioner ideolog. Baik Gurr dan Johnson merasakan kekuatan dan stabilitas pemerintahan tergantung langsung pada tren sosial dan dukungan rakyat. Tidak percaya bahwa organisasi koersif negara dapat secara efektif menekan (untuk jangka panjang) tidak puas atau tidak menyetujui mayoritas orang dalam masyarakat.¹ Negara, dalam teori mereka, adalah aspek dari konsensus utilitarian (Gurr) atau konsensus nilai (Johnson) di masyarakat. Negara dapat

menggunakan kekuatan atas nama konsensus populer dan legitimasi, tetapi pada dasarnya tidak didirikan dalam paksaan yang terorganisasi. Itu semua adalah metode dan hasil yang dicitacitakan radikalisme. Lebih khusus lagi Skocpol menulis:

“Revolusi sosial di Perancis, Rusia, dan Cina muncul dari khusus krisis politik berpusat pada struktur dan situasi negara-negara rezim lama. Peristiwa 1787-89 di Perancis, dari paruh pertama tahun 1917 di Rusia, dan 1911-1916 di Cina, menggerogoti rezim monarki otokratis dan mengorganisir kontrol administratif dan koersif yang terkoordinasi secara terpusat kelas bawah berpotensi memberontak. Krisis revolusioner berkembang saat itu negara-negara rezim lama menjadi tidak mampu menghadapi tantangan perubahan antar situasi nasional. Mengalami ancaman baru atau persaingan yang semakin ketat dari lebih banyak kekuatan yang dikembangkan secara ekonomi di luar negeri, otoritas monarki dibatasi atau dicek dalam upaya tanggapan mereka oleh lembaga yang dilembagakan hubungan organisasi negara otokratik ke kelas atas yang bertanah dan ekonomi agraris.”

Revolusi-revolusi berikutnya juga selalu menggunakan radikalisme sebagai metode pencapaian cita-cita, seperti Revolusi Islam Iran (1979) dan Revolusi Kuba (1959), atau Revolusi Musim Semi Arab (2010-21011) yang melanda negara-negara Arab seperti Tunisia, Mesir, Maroko, Bahrain, Libya, Suriah dan Irak dan yang dicoba hendak disebarkan ke negara-negara mayoritas berpenduduk Muslim seperti Indonesia. Revolusi karena menggunakan metode radikalisme yang melahirkan kekerasan maka dalam setiap revolusi selalu menimbulkan banyak korban jiwa manusia dan kehancuran struktur sosial, budaya dan struktur politik.

Radikalisme dalam Gerakan Pembebasan Nasional

Gerakan pembebasan nasional, baik yang menggunakan kekerasan maupun yang

tidak menggunakan kekerasan selalu mengadopsi radikalisme. Gerakan pembebasan nasional adalah gerakan politik bisa dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan melawan kekuasaan kolonial atau pemerintah nasional, seringkali juga dilakukan untuk tujuan kebebasan berdasarkan identitas nasional dan pandangan anti-imperialis. Gerakan pembebasan nasional juga seringkali bertujuan untuk membebaskan wilayah geografis tertentu dan penduduknya (bangsa) dari rezim yang dianggap sebagai menindas. Gerakan ini juga didasari pada hak menentukan nasib sendiri yang diakomodasi oleh hukum hak azasi internasional.

Dalam gerakan pembebasan nasional ini, baik yang merupakan gerakan tanpa kekerasan maupun dengan kekerasan bersenjata selalu menggunakan paham radikal. Gerakan-gerakan melawan kolonialisme di berbagai negara jajahan sebagian besar dilakukan dengan jalan kekerasan, seperti gerakan kemerdekaan Indonesia, dan negara di Afrika, Asia dan Amerika Selatan. Pasca kolonialisme gerakan-gerakan pembebasan nasional juga menggunakan paham radikal antara lain gerakan-gerakan pembebasan nasional di Irlandia Utara, Spanyol (Basque), Palestina, Filipina (Moro), Thailand gerakan-gerakan pembebasan nasional di Afrika dan yang masih sekarang sedang terjadi di Amerika Latin seperti di Columbia, Mexico, Brazil dan lain-lain. Gerakan pembebasan nasional di Amerika Latin yang radikal yang terkenal antara lain Tentara Pembebasan Nasional Zapatista. Ini adalah kelompok revolusioner bersenjata yang bermarkas di Chiapas, salah satu provinsi termiskin di Meksiko. Basis anggota mereka sebagian besar adalah masyarakat adat, tetapi mereka juga mempunyai pendukung dari wilayah perkotaan seperti halnya dukungan jaringan internasional. Juru bicara mereka, tetapi secara teknis bukanlah pemimpin mereka yang menyebut dirinya dengan *sub-comandante*, adalah Subcomandante Marcos. Seluruh *comandante* berasal dari suku Mayan, Indian Amerika.

Di kolumbia Angkatan Bersenjata Revolusioner Kolombia (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia/FARC) memulai perlawanan pada 1964 untuk

membebaskan Kolumbia dari pemerintahan Kolombia. FARC berhaluan Marxis. Amerika Serikat memasukkan FARC ke dalam daftar organisasi teroris. FARC memulai melancarkan gerakan nasional karena masalah tanah dan sumber daya alam di Kolombia. FARC adalah gerakan pembebasan nasional tertua dan terbesar di Amerika Latin. FARC mendanai gerakannya dengan memproduksi kokain dan menjualnya ke Amerika Serikat. FARC melakukan banyak pembunuhan dan penculikan.

Radikalisme dalam Gerakan Sosial

Radikalisme juga banyak digunakan dalam gerakan-gerakan sosial, gerakan lingkungan hidup, gerakan buruh, gerakan mahasiswa, gerakan perempuan (feminis) dan gerakan-gerakan sosial lainnya. Protes sosial yang radikal misalnya bisa ditemui dalam protes-protes anti Perang Vietnam di Amerika Serikat, protes mahasiswa di China, Thailand, Indonesia, Korea Selatan. Gerakan lingkungan yang radikal misalnya kita temui dalam gerakan-gerakan Green Peace, organisasi penyelamat lingkungan hidup yang kapalnya Rainbow Warrior pernah diledakkan oleh agen rahasia Prancis (1985). Gerakan buruh yang radikal misalnya gerakan buruh Solidaritas di Polandia yang dipimpin oleh *Lech Wałęsa*. *Demikian juga gerakan-gerakan perempuan di Amerika Serikat juga mengadopsi gagasan-gagasan radikalisme.*⁷

⁷ Radikalisme dalam gerakan social baca misalnya tulisan-tulisan sebagai berikut: Cesar Guzman-Concha. (2015) Radical Social Movements in Western Europe: A Configurational Analysis. *Social Movement Studies* 14:6, pages 668-691. Daniel Koehler. (2015) Contrast Societies. Radical Social Movements and their relationships with their target societies. A theoretical model. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 7:1, pages 18-34. Corey Lee Wrenn, Rob Johnson. (2013) A Critique of Single-issue Campaigning and the Importance of Comprehensive Abolitionist Vegan Advocacy. *Food, Culture & Society* 16:4, pages 651-668. Dana Williams. (2011) Why revolution ain't easy: violating norms, re-socializing society. *Contemporary Justice Review* 14:2, pages 167-187. Shiv Ganesh, Heather Zoller, George Cheney. (2005) Transforming Resistance, Broadening Our Boundaries: Critical Organizational

Radikalisme dalam Gerakan Keagamaan

Paham radikalisme juga melanda gerakan keagamaan, atau gerakan politik yang menggunakan cita-cita keagamaan. Negara-negara Eropa dahulu seperti Spanyol dan Portugal yang memperluas negara jajahan menggunakan radikalisme agama untuk gerakan kolonialismenya yakni dengan slogan Glory, Gold dan Gospel. Spanyol secara radikal mengubah budaya setempat menjadi sama dengan budaya, bahasa dan agama yang sama: Katolik. Dewasa ini gerakan politik-keagamaan yang radikal yang menggunakan basis Islam muncul dan berkembang terutama di negara-negara yang menjadi lahan subur radikalisasi seperti di negara-negara Timur Tengah, Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, termasuk Ceko.

Trendnya dimulai tahun 2001, ketika Al Qaeda pimpinan Osama Bin Laden menyerang New York dan Pentagon di Washington DC, para ilmuwan sosial terkejut dan mulai memfokuskan studi tentang gerakan radikal berbasis Islam. Gejala yang sudah dirasakan lebih dari satu dekade tapi tidak mendapat perhatian penuh oleh para peneliti sosial muncul tiba-tiba dan mengejutkan. Lebih dari 5.000 orang tewas di New York dalam serangan itu dan dibalas oleh Amerika Serikat dengan menyerang Afganistan di mana Al Qaeda bermarkas, negara yang dikuasai oleh kaum mujahidin, yang dulu dibantu Amerika Serikat mengusir Uni Soviet dari Afganistan. Para peneliti mulai memfokuskan perhatian ke Afganistan, wilayah yang dalam peperangan melawan Uni Soviet telah menghasilkan banyak sekali jihadis yang radikal. Mereka berasal dari berbagai negara yang datang ke Afganistan untuk ikut berperang melawan Soviet. Sebagian para jihadis yang pulang dari Afganistan membangun gerakan radikal di negaranya masing-masing.

Communication Meets Globalization from Below. Communication Monographs 72:2, pages 169-191. Katherine Meyer, Linda Lobao. (2003) Household, Gender, and Political Responses to Economic Downturn: Extending Theories of Mobilization. The Sociological Quarterly 44:2, pages 159-179.

Gerakan radikal kaum mujahidin Afganistan yang terdesak ke luar Afganistan karena serbuan Amerika Serikat sekarang menyingkir di perbatasan Pakistan dan bergabung dengan gerakan mujahidin Pakistan yang sangat ekstrem hingga melakukan serangkaian pembunuhan terhadap para perempuan yang menentang mereka. Gerakan radikal-kekerasan yang berideologi lebih keras muncul di Mosul, Iraq, ketika Abu Bakar Al-Bagdadi pada 5 Juli 2014 berpidato di Masjid Agung Mosul mengumumkan berdirinya Negara Islam Irak-Suriah (ISIS) yang berideologi Kilafah. Negara yang digagas Al-Bagdadi itu dicoba diwujudkan dengan jalan radikal dan menggunakan kekerasan yang ekstrem. Para milisi ISIS yang sebagian besar datang dari luar Irak dan Suriah mewujudkan gagasan Al-Bagdadi secara brutal dengan banyak melakukan pembunuhan-pembunuhan, eksekusi-eksekusi yang kejam, perkosaan, pengusiran, penghancuran, perbudakan dan kekejaman-kekejaman luar biasa lainnya. Prilaku ISIS adalah perwujudan dari radikalisme berbasis ideologi yang sangat ekstrem. Dengan direbutnya Mosul oleh tentara Irak dan direbutnya Raqqa oleh tentara Suriah dari ISIS, maka banyak milisi ISIS melarikan diri keluar Irak dan Suriah. Termasuk para milisi ISIS asal Indonesia yang jumlahnya mungkin ribuan, dan kembali lagi ke Tanah Air. Kepolisian Republik Indonesia mencatat ada 500 lebih milisi ISIS asal Indonesia yang melakukan repatriasi dan mereka dianggap sebagai ancaman keamanan. ISIS memiliki pengaruh kuat di kalangan kaum radikal di Indonesia, Filipina dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Di Indonesia ISIS memiliki cabang dan banyak pendukung dalam berbagai organisasi radikal bawah tanah seperti Jamaah Ansharut Daulah (JAD) atau (Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang terlibat dalam serangkaian aksi terorisme di Indonesia. Di Filipina kelompok-kelompok pendukung ISIS yang dipimpin oleh Isnilon Hapilon, pemimpin ISIS Asia Tenggara.

Hapilon dengan pasukan Kelompok Abu Sayyaf yang sebelumnya tidak beroperasi di Marawi, bergabung dengan Kelompok Maute yang dipimpin dua anak lelaki keluarga Maute yakni Omarkhayam dan Abdullah Maute. Keluarga Maute, klan berpengaruh di Marawi, membangun basis kekuatan militernya di sekitar Danau

Lanao, pinggiran kota Marawi. Kelompok Maute dituduh telah melakukan pemboman di Davao City pada Oktober 2016. Kelompok ini juga merebut dan menguasai sejumlah gedung pemerintah kota Butig, gedung balaikota, sejumlah gedung sekolah umum dan madrasah, namun berhasil diusir tentara Filipina. Dua bersaudara Maute ini sebelumnya menjalankan bisnis keamanan di Butig.⁸ Dua kekuatan ini -- ditambah para milisi asing dari luar Filipina -- bergabung dan menguasai Marawi, membunuh dan menyandera banyak orang. Sekitar 200 ribu penduduk Marawi melarikan diri dari kota itu. Hanya dalam 36 hari pertempuran di Marawi, pada 5 Oktober 2017, militer Filipina mengumumkan 765 milisi Maute terbunuh, 155 tentara dan 47 warga sipil tewas.

Marawi dipilih tampaknya karena wilayah itu wilayah Muslim dan kontrol tentara atas Marawi dan Mindanao pada umumnya tidak ketat, terutama kontrol di wilayah perbatasan. Selama ini Abu Sayyaf sukses mengontrol perairan antara Malaysia dan Kepulauan Sulu, melakukan pembajakan kapal-kapal, termasuk kapal-kapal Indonesia dan menyandera awak-awak kapal untuk ditukar dengan uang tebusan. Maka kehadiran kelompok Abu Sayyaf di Marawi tidak lain karena penunjukkan Hapilon sebagai pemimpin kekhalifahan ISIS Asia Tenggara.

Colin J. Beck menggambarkan gerakan radikalisme, revolusi dan terorisme sebagai berikut:

“Daripada mempertimbangkan tujuan radikalisme dalam gerakan sosial, terjadinya revolusi, dan penggunaan terorisme dan kekerasan politik secara terpisah, saya pertimbangkan mereka di sini secara bersama. Masing-masing adalah bentuk aksi kolektif, yang dapat didefinisikan sebagai tindakan terkoordinasi oleh dua orang atau lebih untuk mengubah

⁸ Baca juga Rory MacNeil (2017). Marawi: Behind the Headlines, How did Marawi become the center of a crisis and what needs to be done next? www.thediplomat.com, 31 Agustus.

kondisi untuk grup. Bayangkan diagram Venn dengan tiga lingkaran. Sementara setiap lingkaran: radikalisme, revolusi, dan terorisme - memiliki beberapa aspek yang unik, ada ruang di mana tiga tumpang tindih. Jadi, untuk memahami radikalisme atau revolusi atau kekerasan politik, kita harus memahami ketiganya.”⁹

Beck, tentang radikalisme mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nemantang yakni:

apa itu radikalisme? Siapa yang radikal? Bagaimana gerakan radikal berorganisasi? Kapan dan di mana radikalisme bisa terjadi? Apakah radikalisme tentang ide dan ideologi? Adakah siklus kehidupan radikalisme? Bagaimana dan mengapa radikalisme menyebar? Dan apa masa lalu dan masa depan dari radikalisme? Beck menjelaskan bagaimana cara untuk memahami perbedaan dan persamaan antara radikalisme, revolusi, dan terorisme yang dipetakan ke dalam struktur politik dan basis kekuasaan). Menurut Beck, melalui metode terorisme dalam struktur politik tertutup dan basis kekuatan yang luas, maka otoritarianisme populis adalah hasil yang diinginkan oleh gerakan radikalisme. Radikalisme sendiri juga memiliki siklus, timbul dan tenggelam dalam situasi yang bergantung pada faktor historis, politik, dan sosial yang bermain dalam situasi tertentu.¹⁰

Tetapi memang, tidak semua gerakan radikalisme yang menggunakan kekerasan adalah terorisme atau revolusi. Khusus mengenai gerakan radikalisme dan terorisme, merujuk Charles Tilly, Colin J. Beck mencoba menjelaskan bahwa tidak semua gerakan radikalisme yang menggunakan kekerasan adalah terorisme sebagai berikut:

“Charles Tilly menekankan bahwa terorisme adalah strategi pertarungan politik yang bisa digunakan oleh berbagai aktor. Tilly (2004) mendefinisikan strategi sebagai penyebaran ancaman dan kekerasan terhadap

⁹ Beck, op.cit halaman 12.

¹⁰ Colin J. Beck (2015) *Radicals, Revolutionaries, and Terrorists*, Malden, MA: Polity.

musuh yang asimetris menggunakan sarana yang berada di luar bentuk-bentuk perjuangan politik yang secara rutin beroperasi dalam beberapa rezim saat ini. Ide utamanya di sini adalah bentuk-bentuk perjuangan politik yang rutin dan non-rutin. Ada banyak aksi kekerasan yang terjadi selama perang, tetapi karena kita memahami perang sebagai satu set aksi kekerasan yang terorganisir, kita berharap ini dan tidak ada hasil teror. Di sisi lain, meledakkan bom di acara lomba lari marathons dapat dianggap terorisme karena itu bersifat non-rutin dan di luar bentuk-bentuk umum politik. Definisi Tilly di atas merujuk pada akar terorisme sebagai kekerasan dan ancaman yang tak terduga. Ada juga jenius lain dalam konseptualisasi ini. Tilly dengan sengaja agnostik tentang siapa aktor teroris selama mereka bertindak di luar rutinitas umum dan bertindak secara asimetris (dengan kata lain, tidak hanya menanggapi dengan baik). Ini memungkinkan terorisme menjadi aksi bahwa baik aktor negara maupun non-aktor negara dapat digunakan.”¹¹

Remy Cross dan David A. Snow menggolongkan radikalisasi menjadi empat tipe radikal yakni: (1) Radikal Oportunistik (2) Radikal Terkoordinasi (3) Radikal Militer dan (4) Radikal Penyendiri.

(1) Radikal Oportunistik

Para radikal yang tidak melihat tindakan keras dari aparat penegak hukum, dan yang tidak mampu membuat hubungan erat dengan rekan-rekan mereka yang radikal, mengikuti jalan menuju aktivisme radikal yang agak terbatas. Tidak semua radikal mampu membuat hubungan dengan radikal lain. Untuk berbagai alasan, beberapa mungkin disimpan di luar organisasi, Biasanya ini adalah masalah aktivis yang tidak dapat memunculkan kepercayaan dari rekan-rekan aktivisnya. Meskipun sering ditoleransi oleh

organisasi gerakan, radikal oportunistik ini sering dipandang sebagai risiko keamanan potensial bagi organisasi. Ketidakmampuan mereka untuk membentuk ikatan afektif berarti bahwa mereka ada di pinggiran kelompok-kelompok di mana mereka berada, dan bahwa radikalisme mereka, oleh kebutuhan, urusan individu. Meskipun radikal, mereka cenderung menjauhkan diri dari bentuk-bentuk aktivisme yang sangat keras. Secara intuitif, mereka memahami bahwa mereka kekurangan dukungan jika mereka tertangkap, dan bahwa terlibat dalam kekerasan yang berlebihan dapat mengakibatkan pengusiran dari organisasi mana pun yang menjadi bagian dari mereka. Namun, pada saatnya, radikal oportunistik ini dapat berpindah ke arah tipe penyendiri yang dibahas di bawah ini.

(2) Radikal Terkoordinasi

Sebaliknya, orang-orang radikal yang terhubung dengan kelompok afinitas terlibat dalam jenis radikalisme yang disebut Remy Cross dan David A. Snow sebagai radikalisme terkoordinasi. Hal ini ditandai oleh hubungan asosiasi yang erat dan dukungan fasilitatif dari aktivisme risiko tinggi, serta oleh pendekatan pragmatis terhadap kekerasan dan ilegalitas. Hubungan yang dimiliki kaum radikal ini dengan aktivis akar rumput lainnya hampir bersimbiosis. Mereka adalah aktivis yang berkomitmen, berpengalaman, dan cerdas yang dapat membentuk tulang punggung dari proyek apa pun. Pada gilirannya, radikal terkoordinasi ini mendapatkan ruang aman dan keamanan yang disediakan oleh organisasi mereka. Mereka juga mendapatkan tempat di mana mereka dapat membuat kontak dan menjalin pertemanan dengan orang-orang radikal potensial lainnya dan membawa darah baru ke dalam kelompok afinitas mereka.

Untuk radikal terkoordinasi, ada premi yang ditempatkan pada kebijaksanaan. Mereka tahu tindakan mereka dapat membalas rekan-rekan mereka, menempatkan mereka dalam bahaya dan mengganggu organisasi di mana mereka menjadi bagiannya. Oleh karena itu, mereka cenderung menjaga radikalisme mereka untuk diri mereka sendiri, agar tidak membahayakan orang yang tidak

¹¹ Beck, Loc cit halaman 12.

terlibat secara langsung dengan radikalisme.

Secara umum, kaum radikal yang terkoordinasi adalah mereka yang telah menemukan suatu medium yang menyenangkan antara aktivisme akar rumput yang lebih konvensional dan aktivitas radikal mereka. Mereka mampu membuat koneksi dengan aktivis lain yang dapat diaktifkan dan digunakan untuk terlibat dalam aktivisme berisiko tinggi yang menandai mereka sebagai radikal. Mereka juga terlibat dalam aktivitas berisiko rendah dalam kehidupan sehari-hari. Mereka mendekati aktivisme dari sikap pragmatis. Mereka bersedia mengikuti mayoritas, tetapi mereka juga bersedia merangkul radikalisme ketika diperlukan. Mereka mengakui pentingnya hubungan akar rumput mereka, namun, dan berhati-hati untuk tidak mempertaruhkan hubungan tersebut.

(3) Radikal Militan

Pendekatan yang terukur dan pragmatis terhadap kekerasan dan aksi langsung dari para radikal yang terkoordinasi bertolak belakang dengan radikal yang lebih militan yang dibicarakan oleh Della Porta. Sementara para militan, seperti para radikal yang terkoordinasi, mampu membentuk kelompok-kelompok kedekatan yang erat terhadap pendekatan yang lebih ekstrem sering menempatkan mereka bertentangan dengan rekan-rekan mereka yang kurang radikal. Rasa tertindas di kalangan militan sering membawa mereka untuk mendukung sikap yang memperkuat keyakinan bahwa segala jenis wacana sipil dengan pihak berwenang adalah "permainan pengisap," bahwa "waktu untuk berbicara telah berakhir," dan karena itu satu-satunya pilihan yang layak adalah kekuatan dan kekerasan.

Kaum radikal militan mempertahankan kewaspadaan yang sama seperti radikal terkoordinasi ketika mendiskusikan tindakan-tindakan radikal, dan mereka terus melakukan diskusi semacam itu dalam kelompok mereka. Sifat yang lebih keras dan ekstrem dari kegiatan mereka berarti ada persepsi yang meningkat bahwa tindakan mereka dapat membawa pukulan ke organisasi mereka, serta kelompok lain. Ini menjadikan eksposur mereka sebagai militan sesuatu yang berusaha mereka hindari. Namun, biasanya, aktivis lain

dapat melihat para militan, karena kecenderungan mereka untuk "terlalu cepat mencari solusi paling ekstrem terhadap masalah" dan bahwa "hal semacam itu hanya membuat kita semua terlihat buruk."

(4) Radikal Penyendiri

Kategori terakhir adalah penyendiri, atau lone-wolf radical.¹² Penyendiri, seperti radikal oportunistik, tidak dapat menemukan kelompok afinitas. Seperti para milisi, mereka berbagi kesan bahwa mereka diburu dan ditindas oleh penegak hukum, dan bahwa metode ekstrem adalah solusi terbaik. Kombinasi khusus ini membuat mereka tidak cocok untuk keterlibatan dengan aktivis lain. Ketidakkampuan mereka untuk membuat ikatan, dan sikap mereka yang sering beringas, membuat mereka menjadi tanggung jawab untuk setiap kelompok yang berafiliasi dengannya.

Penyendiri dapat digambarkan dengan baik, dalam kata-kata aktivis radikal lainnya, sebagai jenis orang yang "berhati-hati tetapi paranoid." Penelitian Remy Cross dan David A. Snow menunjukkan bahwa mereka tidak diterima dalam kelompok radikal karena mereka "bukan pemain tim" dan "tidak akan mempercayai kita bagaimanapun." Kesan keseluruhannya adalah bahwa walaupun para radikal penyendiri itu ada, mereka menjauh dari jenis-jenis aktivisme yang secara sosial terkoordinasi yang di dalamnya para radikal lainnya berpartisipasi.

Radikalisme dengan empat tipenya menghasilkan aksi-aksi terorisme dan kemudian menjadi keawatiran global karena aktifitas *cross border terrorism* terjadi di berbagai belahan dunia, karena aktifitas terorisme sudah menjadi peristiwa global. Hampir tidak ada negara yang terbebas dari aktifitas terorisme. Terorisme berhimpun dalam organisasi-organisasi yang berjaringan secara langsung ataupun tidak langsung secara global. *Cross border terrorism* menjadi isu yang penting karena

¹² Baca juga Turchie, Terry and Kathleen Puckett, *Hunting the American Terrorist: The FBI's War on Homegrown Terror* (Palisades, NY: History Publishing Company, 2007).

aktifitas lintas batas gerakan terorisme global.

Politik Identitas dalam Masyarakat Multikultural: Sumber Lain Radikalisme

Multikultural bisa menjadi berkah bagi sebuah bangsa namun sebaliknya bisa menjadi masalah yang tidak terpecahkan bagi bangsa itu. Bagi sebuah bangsa yang terus belajar, Iris Marion Young menawarkan cara pandang baru tentang masyarakat multikultural,¹³ yakni sebuah genda bahwa multikulturalisme merupakan salah satu cara membuka kesadaran masyarakat untuk bisa lebih menerima perbedaan. Salah satu langkahnya, seperti dianjurkan Young adalah diperbanyaknya struktur partisipatoris di mana setiap orang dengan segala perbedaan etnis, gender, status (kedudukan), dan asal-usul geografis atau kepercayaan mampu memperkenalkan pandangan masing-masing atas realitas sosial dan menampung representasi suara-suara perbedaan mereka.

Will Kimlicka¹⁴ menjelaskan bahwa satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, di mana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, memiliki bahasa dan kebudayaan sendiri. Menurut Kymlicka suatu bangsa dalam arti sosiologis berkaitan erat dengan pengertian suatu masyarakat atau suatu kebudayaan, sebuah konsep yang sering dipertukarkan. Oleh karena itu suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa bukanlah negara bangsa, melainkan negara multibangsa dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa.¹⁵ Dengan demikian Indonesia adalah negara multi bangsa, bukan negara bangsa (*nation state*) sebagaimana diperkenalkan selama ini. Relevan dengan apa yang terjadi dalam

sejarah politik dan budaya pada wilayah Papua, Kymlicka menegaskan:

“Masuknya berbagai bangsa dalam suatu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika masyarakat satu kebudayaan diserang atau ditaklukkan oleh masyarakat lainnya, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial lain ke kekuatan imperial lainnya atau ketika tanah mereka diduduki pendatang yang menjajah. Namun pembentukan negara multibangsa dapat juga terjadi secara sengaja, ketika berbagai kebudayaan sepakat untuk membentuk suatu federasi untuk kepentingan bersama.”¹⁶

Menurut Kymlicka, sebagian besar negara demokrasi Barat merupakan negara multibangsa seperti Finlandia, Swis dan Belgia di Eropa, Selandia Baru, Australia, Kanada dan Amerika Serikat. Kaum pendatang Eropa di negara yang kini bernama Amerika Serikat menaklukkan bangsa Indian, Puerto Rico, menganeksasi Texas, New Mexico dan California setelah Perang Mexico, 1846-1848, dan menduduki Hawaii, Guam dan kepulauan di Pasifik lainnya. Wilayah-wilayah yang dihuni oleh bangsa-bangsa berbeda tersebut bergabung ke dalam wilayah Amerika Serikat bukan secara suka rela melainkan melalui penaklukan. Kymlicka berpendapat, jika pada saat penaklukan terjadi terdapat kekuatan yang seimbang maka kelompok-kelompok bangsa tersebut mungkin mampu bertahan dan membentuk pemerintahan yang berdaulat sendiri. Mereka ingin merdeka namun hanya sebatas wacana. Keinginan historis kelompok-kelompok bangsa tersebut bukanlah meninggalkan Amerika Serikat melainkan mencari otonomi di dalam negara itu.¹⁷ Ketika bergabung kelompok-kelompok bangsa ini telah mendapatkan status politik khusus, terutama menyangkut identitas politik mereka dalam pemerintahan yang otonom.

Multikulturalisme selalu melahirkan politik identitas atau politik perbedaan. Clifford Geertz menulis judul yang provokatif, “Apakah Suatu Negeri Jika Ia Bukan Suatu Bangsa?” Dalam

¹³ Iris Marion Young, *Inclusion and Democracy*, Oxford, 2002

¹⁴ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*, LP3ES, Jakarta, 2003.

¹⁵ Kymlicka, *op.cit.*, halaman 14.

¹⁶ Kymlicka, *op.cit.*, halaman 14-15.

¹⁷ Kymlicka, *op.cit.*, halaman 15.

tulisan ini Geertz melaporkan pengamatan terbarunya tentang politik identitas yang meluas di akhir abad ke-20. Menurut Geertz dalam pemakaian sehari-hari kita menyamakan begitu saja konsep-konsep seperti bangsa (*nation*), negara (*state*), negeri (*country*), masyarakat (*society*) dan rakyat (*people*). Bagi Geertz yang problematik adalah pasangan konsep negeri dan bangsa.¹⁸ Geertz seperti dikutip Hardiman menulis:

“Kalau keduanya disamaratakan begitu saja, konsep pertama akan ditelan oleh yang terakhir dan ini merupakan imajinasi yang mengecoh, karena sebuah negeri seolah-olah hanya didiami oleh satu bangsa saja. ‘Bangsa’ adalah kumpulan orang dengan bahasa, darah, sejarah dan tanah yang sama dan ‘negeri’ sebagai teritorium atau tanah dari kumpulan orang itu. Dalam arti ini, negeri merupakan arena politis, *political space*, tempat interaksi sosial ditata, peluang hidup dan sumber-sumber produktif dibagi-bagikan, sedangkan bangsa adalah kekuatan politis dalam arena itu. Tetapi dunia seolah terbius dalam imajinasi tentang identifikasi negeri dan bangsa, sampai Perang Balkan membangunkannya dari tidur ala *sleeping beauty* itu. Yugoslavia, ‘betul-betul merupakan contoh terang-terangan dari ketidakcocokan isi dan kenyataan dari konsep-konsep ‘bangsa’ dan ‘negeri’ yang sering disamakan begitu saja.”¹⁹

Manuel Castells berpendapat bahwa dalam konstruksi sosial, identitas selalu mengambil tempat dalam hubungan kekuasaan. Menurut Castells, ada tiga bentuk asal-usul identitas yang dapat membangun sebuah legitimasi identitas, yang pertama, diperkenalkan oleh institusi dominan dalam masyarakat; Kedua adanya resistensi sebuah identitas yang dipertahankan oleh para aktor pengikutnya, meski mendapatkan perlawanan karena prinsip-prinsip yang mereka anut

bertentangan dengan lembaga-lembaga sosial, dan ketiga adalah identitas sebagai sebuah proyek yang oleh para aktornya dijadikan dasar untuk membangun sebuah identitas baru yang mengubah posisi mereka dalam masyarakat.²⁰ Politik identitas antara lain juga melahirkan radikalisme.

Teori *relative deprivation* (deprivasi relatif) James G. Kellas bisa digunakan untuk menganalisis akar masalah dalam multikulturalisme dan radikalisme. Menurut Kellas, kebanyakan kelompok/bangsa minoritas merasa bahwa kebudayaan mereka berada di bawah ancaman negara (*under attack*) yang biasanya didominasi oleh kebudayaan kelompok/bangsa mayoritas. Hal ini menimbulkan perasaan *cultural deprivation* (deprivasi budaya) di antara bangsa-bangsa minoritas dalam negara bangsa tersebut. Atas hal ini Kellas menjelaskan sebagai berikut:

“Deprivasi relatif berhubungan erat dengan nasionalisme, dan bisa berbentuk deprivasi politik, ekonomi dan deprivasi budaya. Deprivasi budaya dalam konteks nasionalisme adalah pengalaman-pengalaman dalam hal diskriminasi atau penghinaan yang terjadi baik terhadap identitas komunitas seseorang, bahasa (termasuk aksen), agama, kebiasaan, cita rasa dan lain-lain. Kejadian-kejadian diskriminasi dan penghinaan tersebut terjadi berulang-ulang, tentu saja, berlangsung dalam kontak langsung antara kelompok nasional dominan dan kelompok nasional yang didominasi, juga dalam pengalaman kolektif kelompok yang didominasi tersebut, antara lain dalam hal penggunaan bahasa atau pendidikan yang secara resmi dipaksakan kepada semua warganegara oleh negara. Kebijakan-kebijakan seperti ini dijalankan oleh negara dengan undang-undang dan regulasi lainnya. Semua ini mengarahkan pada perasaan deprivasi budaya (perampasan, pencabutan akar budaya), dan perampasan atau

¹⁸ Clifford Geertz, *Welt in Stuecken*. Kultur und Politik am Ende des 20, Jahrhunderts Passagen-Verlag, Wienm 1996.

¹⁹ F. Budi Hardiman, *op.cit.*, halaman vii, Clifford Geertz, *halaman 62*.

²⁰ Manuel Castells, *The Power of Identity*, Blackwell Publishing, 1997, halaman 8

pencabutan budaya jenis ini setidaknya penting untuk menjelaskan perilaku nasionalisme sebagaimana juga dalam hal deprivasi ekonomi relatif.”²¹

Dalam hal hubungan ekonomi, politik dan deprivasi relatif, Kellas menjelaskan:

“Masyarakat dalam suatu negara atau wilayah yang merasa terdeprivasi secara relatif (perasaan tercerabut atau tertindas) karena situasi ekonomi yang sedemikian rupa dapat menjadi kegelisahan politik. Kelompok masyarakat ini mungkin menuntut perubahan atas perasaan terdeprivasi ini. Di pihak lain, kelompok masyarakat ini bisa saja berdiam diri; mereka mungkin lebih suka beremigrasi sebagai tindakan pemberontakan, dan mereka mungkin menjadi fatalis..... Dengan demikian, sebuah kelompok etnis yang tidak kuat secara politik akan memberontak dan mencoba mengubah posisi politiknya. Jika perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi memaksa sebuah kelompok etnis yang berkuasa membagi kekuasaan politik, konflik-konflik tak mungkin terjadi. Bagaimanapun, di mana kelompok-kelompok etnis memperoleh keuntungan ekonomi atau sebaliknya kehilangan kekuasaan ekonomi, sementara kekuasaan politik mereka tetap atau bergerak ke arah sebaliknya, nasionalisme akan berkembang.”²²

Dengan demikian teori deprivasi relatif yang dikemukakan Kellas berkaitan dengan keterancaman baik keterancaman secara politik, budaya, ekonomi, sosial dan hukum yang dialami oleh kelompok minoritas bangsa atas dominasi kekuasaan mayoritas bangsa yang memegang kekuasaan negara. Kelompok minoritas bangsa akan selalu merasa bahwa kelompok mayoritas bangsa yang berkuasa akan menyerang mereka dan memaksakan kehendaknya. Dalam situasi seperti ini maka perasaan nasionalisme atau lebih

ekstrem lagi *ethno nationalism* (etno nasionalisme) akan berkembang dalam komunitas minoritas bangsa tersebut.

Pendudukan Kota Marawi di Pulau Mindanao, Filipina Selatan oleh kelompok bersenjata pimpinan Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf dan Omarkhayam Maute pemimpin Kelompok Maute selama 148 hari (Mei hingga Oktober 2017), mengingatkan kembali tentang ancaman *cross border terrorism*, bahwa wilayah perbatasan, baik laut maupun darat adalah wilayah pertahanan yang paling sulit dikontrol. Kelompok Isnilon Hapilon dan Maute --- yang berafiliasi kepada Islamic State in Iraq and Syria (ISIS) pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi yang bermarkas di Mosul, Irak dan kemudian pindah ke Raqqa, Suriah --- berhasil menembus perbatasan laut Filipina. Mereka berhasil menyelundupkan ratusan milisi asing, persenjataan dari senapan serbu ringan, berat, senjata pelontar granat, hingga bom rakitan yang biasa digunakan milisi ISIS di Irak dan Suriah, masuk ke Kota Marawi.

Setelah Hapilon dan Maute terbunuh oleh tentara Filipina pada 17 Oktober 2017 yang mengakhiri pendudukan Marawi oleh kelompok bersenjata ini, otoritas Filipina, seperti Inter-Agency Border Security Coordinating Council (IABSCC), mulai mengevaluasi bagaimana wilayah perbatasan negara itu sangat lemah. Peristiwa seperti ini akan terjadi lagi jika strategi pertahanan wilayah perbatasan Filipina tidak segera diperbaiki. Maka, seperti diberitakan media di Filipina, yang juga menulis tentang lemahnya garis pertahanan perbatasan, Panglima Komando Militer Filipina Selatan, Letnan Jendral Rey Leonardo Guerro memerintahkan peningkatan penjagaan di wilayah perbatasan. ISIS, oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa digolongkan sebagai organisasi teroris, dan memang demikianlah kenyataannya. ISIS yang memiliki cita-cita khilafah, sebuah konsep negara tanpa tapal batas, mengirim sel-selnya untuk melancarkan serangan teroris ke seluruh dunia, dari Eropa, Amerika, Mesir, Pakistan, Australia, Thailand, Indonesia dan yang

²¹ James G. Kellas, *The Politics of Nationalism and Ethnicity*, St Martin's Press, Inc., 1998, halaman 86.

²² *Ibid.*, halaman 78-79.

paling besar adalah serangan kelompok Hapilon dan Maute di Filipina. Terorisme merupakan ancaman terbesar lintas batas dewasa ini. Sel-sel teroris dikirim melewati perbatasan antar negara dan melancarkan serangan mematikan di negara-negara tersebut. Maka tantangan besar pertahanan wilayah perbatasan adalah masuknya gelombang sel-sel terorisme ke negara-negara sasaran.²³

Tidak ada tanda-tanda bahwa Marawi akan diduduki oleh kelompok bersenjata yang berafiliasi kepada ISIS. Kota kecil di Mindanao itu adalah kota Muslim di wilayah selatan Filipina yang mayoritas penduduknya Muslim. Pertanyaannya adalah mengapa Marawi jadi sasaran? Mengapa bukan kota-kota perbatasan di Malaysia dan Indonesia di dua negara di mana telah tumbuh dan berkembang organisasi-organisasi dan sel-sel yang berafiliasi kepada ISIS? Organisasi afiliasi ISIS terbesar di Indonesia adalah Jamaah Islamiah, anggotanya cukup banyak di Indonesia. Tapi jawaban mengapa Marawi tampaknya adalah penunjukkan Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf sebagai Emir Wilayah Asia Tenggara (sebuah wilayah kekhalifahan) oleh pemimpin ISIS, Abu Bakr Al-Baghdadi. Hapilon ingin menunjukan kepada Al-Baghdadi kesetiaannya dengan memperluas wilayah kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara.

Hapilon dengan pasukan Kelompok Abu Sayyaf yang sebelumnya tidak beroperasi di Marawi, bergabung dengan Kelompok Maute yang dipimpin dua anak lelaki keluarga Maute yakni Omarkhayam dan Abdullah Maute. Keluarga Maute, klan berpengaruh di Marawi, membangun basis kekuatan militernya di sekitar Danau Lanao, pinggiran kota Marawi. Kelompok Maute dituduh telah melakukan pemboman di Davao City pada Oktober 2016. Kelompok ini juga merebut dan menguasai sejumlah gedung pemerintah kota Butig, gedung balaikota, sejumlah gedung sekolah umum dan madrasah, namun berhasil diusir tentara Filipina. Dua bersaudara Maute ini

sebelumnya menjalankan bisnis keamanan di Butig.²⁴ Dua kekuatan ini -- ditambah para milisi asing dari luar Filipina -- bergabung dan menguasai Marawi, membunuh dan menyandera banyak orang. Sekitar 200 ribu penduduk Marawi melarikan diri dari kota itu. Hanya dalam 36 hari pertempuran di Marawi, pada 5 Oktober 2017, militer Filipina mengumumkan 765 milisi Maute terbunuh, 155 tentara dan 47 warga sipil tewas.

Marawi dipilih tampaknya karena wilayah itu wilayah Muslim dan kontrol tentara atas Marawi dan Mindanao pada umumnya tidak ketat, terutama kontrol di wilayah perbatasan. Selama ini Abu Sayyaf sukses mengontrol perairan antara Malaysia dan Kepulauan Sulu, melakukan pembajakan kapal-kapal, termasuk kapal-kapal Indonesia dan menyandera awak-awak kapal untuk ditukar dengan uang tebusan. Maka kehadiran kelompok Abu Sayyaf di Marawi tidak lain karena penunjukkan Hapilon sebagai pemimpin kekhalifahan ISIS Asia Tenggara.

Studi tentang *cross-border terrorism*, migrasi dan *human trafficking*, terutama *women and child trafficking* sudah banyak dilakukan. Temuan-temuan studi itu memang mengejutkan. Penelitian-penelitian yang saya lakukan di sejumlah wilayah perbatasan di Kalimantan menunjukkan *women trafficking* dijalankan secara *cross-border* melalui baik perlintasan perbatasan resmi maupun lintasan perbatasan tidak resmi, yakni melalui jalan-jalan tikus untuk menghindari pemeriksaan imigrasi. Para korban perdagangan manusia ini yang melintas batas ke wilayah Malaysia akan ditampung di tempat-tempat penampungan di kota-kota di Serawak. Dari tempat-tempat penampungan tersebut para korban perdagangan manusia disebar ke berbagai tempat, terutama di tempat-tempat hiburan malam dan bekerja di tempat-tempat prostitusi. Malaysia seringkali juga hanya menjadi

²³ Michel R. Ronzkowski (2006). *Terrorism and Organized Hate Crime, Intelligence Gathering, Analysis and Investigation*, CRC Press.

²⁴ Baca juga Rory MacNeil (2017). Marawi: Behind the Headlines, How did Marawi become the center of a crisis and what needs to be done next? www.thediplomat.com, 31 Agustus.

wilayah singgah untuk dikirim ke negara ketiga. Sel-sel teroris yang beraktifitas di luar Indonesia juga memanfaatkan tempat-tempat *cross-border* yang aman di wilayah perbatasan Kalimantan yang membentang panjang. Kota-kota seperti Nunukan di Kalimantan Utara merupakan kota tempat transit setelah mereka berhasil melintas batas dari Filipina Selatan dan Serawak, Malaysia.

Pendudukan serupa di Kota Marawi pernah terjadi di Sabah, wilayah Malaysia ketika sekitar 200 tentara Kesultanan Sulu, Filipina menduduki Lahad Datu, Sabah, pada 2013. Kesultanan Sulu mengirim pasukan ke Sabah untuk mengembalikan wilayah Sabah yang mereka klaim sebagai wilayah Kesultanan Sulu. Pendudukan itu juga menimbulkan diskusi tentang strategi pertahanan di wilayah perbatasan Sabah dari ancaman Kesultanan Sulu yang memiliki pasukan yang militan. Di Timur Tengah, ISIS mampu menguasai wilayah-wilayah di Irak dan Suriah karena dua negara ini tidak mampu menjaga pertahanan perbatasannya, misalnya dibandingkan Israel dan Lebanon yang mampu menjaga wilayah pertahanan perbatasannya dari serangan milisi ISIS. Bertahun-tahun milisi ISIS menguasai kota-kota besar seperti Fallujah dan Mosul di Irak.

Geopolitik untuk Menangkal Radikalisasi dan Serangan Kelompok-Kelompok Radikal

Di dalam peta garis perbatasan dua negara merupakan sebuah garis yang dapat berupa garis lengkung atau garis lurus. Dalam kenyataannya, yang dimaksud dengan garis perbatasan ini adalah bidang vertikal yang melalui permukaan tanah lapisan bawah tanah dan udara. Jadi garis perbatasan itu berlaku bagi kegiatan-kegiatan di bawah tanah seperti pertambangan, di udara dan di atas permukaan bumi. Garis batas darat biasanya ditetapkan secara alami (*natural*) dan secara buatan (*artificial*). Garis batas darat alami merupakan bentukan bentang alam yang digunakan untuk tanda batas suatu negara (misalnya sungai dan atau gunung atau perbukitan). Fungsi garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi

juga *contact point* (titik singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dari negara-negara yang berbatasan.

Selain Amerika Serikat yang sedang membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko, Israel yang sudah membangun tembok tinggi di perbatasan dengan Palestina, India dan Pakistan juga membangun tembok perbatasan untuk melindungi diri dari serangan *cross-border terrorism*. Berikut ini adalah riset Maria Amjad: tentang pembangunan tembok dan pagar pembatas di perbatasan India-Bangladesh, India-Pakistan dan Pakistan-Afganistan.²⁵

India membangun tembok dan pagar di perbatasannya dengan Bangladesh. Di sisi timur, India berencana membangun penghalang, pagar kawat berduri sejauh 3.406 kilometer dan tembok beton setinggi di bawah tiga meter, untuk mencegah imigrasi lintas batas dan perdagangan manusia dari Bangladesh. India memiliki perbatasan internasional sepanjang 4.096 kilometer, perbatasan darat terpanjang kelima di dunia. Sejumlah tonggak menandai perbatasan antara kedua negara tersebut. Kesepakatan batas darat untuk menyederhanakan perbatasan diratifikasi baik oleh India dan Bangladesh pada 7 Mei 2015. India memperkuat hubungan bilateral dengan Bangladesh dengan membangun jaringan pipa bahan bakar minyak berdasarkan perjanjian pasokan 15 tahun dengan Bangladesh. Selanjutnya, hubungan kereta api dan jalan yang tersedia untuk transportasi orang dan barang di perbatasan India-Bangladesh juga menjadi aspek untuk memperkuat hubungan di perbatasan tersebut. Kerja sama nuklir untuk tujuan damai dan bantuan militer India ke Bangladesh semuanya dimaksudkan untuk mendorong hubungan bilateral yang kuat. Namun, radikalisme Muslim Bangladesh dan keterlibatan mereka ke dalam aktifitas jihadis mencemaskan India. India sudah menghadapi radikalisme jihadis Pakistan dan sekarang jika Bangladesh jatuh ke tangan jihadis, India harus menghadapi dua perbatasan

²⁵ Maria Amjad (2017). "Cross-Border Terrorism, Migration and Human Trafficking: The Rise of Border Walls in South Asia" <http://moderndiplomacy.eu>.

yang akan sangat rawan. Oleh karena itu, India mulai membangun pagar untuk mencegah masuknya orang-orang Bangladesh ke negara tersebut. Selain itu, perbatasan tersebut digunakan pengungsi Rohingya dari negara bagian Rakhine, Burma, untuk masuk ke wilayah India.

India juga membangun tembok di perbatasannya dengan Pakistan. Berdasarkan Garis Radcliffe pada 1947, negara bagian India dan empat provinsi di Pakistan dipisahkan. Perbatasan itu melintas dari Line of Control (LoC), yang memisahkan Kashmir yang dikelola India dari Kashmir yang dikelola Pakistan di utara, ke Wagah, yang memisahkan negara bagian Punjab India dan Provinsi Punjab Pakistan di timur. Zero Point memisahkan negara bagian India di Gujarat dan Rajasthan ke provinsi Sindh, Pakistan, di selatan. LoC yang memisahkan Kashmir yang dikelola India dengan Kashmir Pakistan adalah salah satu batas paling kontroversial di dunia. Garis perbatasan tersebut telah menyaksikan banyak konflik, pertengkaran, dan perang antara kedua negara tersebut. Yang terbaru adalah bentrokan India-Pakistan di sepanjang LoC pasca serangan Uri pada 2016. India menuduh Pakistan mendukung kelompok teroris bersenjata untuk menyerang basis pemerintahan di belakang garis pertahanan tentara India di Uri, yang dikelola oleh Kashmir India. Selain itu, India juga menyalahkan sepuluh orang yang menyerang Hotel Taj dan Oberoi, Stasiun Kereta Api Pusat, dan Pusat Yahudi di Mumbai pada 2008 dikaitkan dengan organisasi teroris yang berbasis di Pakistan, Lashkar-e-Tayyiba, yang dipimpin oleh Hafiz Muhammad Saeed. Untuk menjamin keamanan di sepanjang LoC ini, India memutuskan memagari perbatasannya di sepanjang LoC. India percaya bahwa pemagaran perbatasan akan membatasi gerakan lintas batas terorisme dan infiltrasi militan ke India.

Pakistan memutuskan membangun pagar di sepanjang Durand Line yang berbatasan dengan Afganistan, dan keputusan ini dipengaruhi oleh terorisme lintas batas dan pergerakan bebas teroris masuk dan keluar dari wilayah Pakistan. Kedua negara berbagi perbatasan sejauh 1.500 mil yang dikenal secara

internasional sebagai Durand Line, yang dibuat pada abad ke-19 ketika Inggris menguasai wilayah tersebut. Perbatasan kedua negara telah lama menjadi isu yang diperdebatkan. Sejak jatuhnya pemerintah Taliban pada 2001, pejabat Afghanistan dan negara-negara Barat yang menguasai Afghanistan, menyatakan bahwa para pemimpin Taliban Afghanistan mempertahankan tempat-tempat tersembunyi di Pakistan, khususnya di kota Quetta untuk basis pertahanan mereka. Gerakan yang bebas melintasi perbatasan telah membantu militan menghindari kekalahan dalam perang 15 tahun yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini. Pada saat yang sama, Afghanistan menuduh Pakistan menyimpan terorisnya sendiri, menginginkan pemimpin Taliban Afghanistan dan sekutu jaringan Haqqani. Sebaliknya, Pakistan menuduh Afghanistan menutup mata terhadap militan Islam yang beroperasi di sepanjang perbatasan dan melakukan serangan mematikan di wilayah mereka yang berbasis di seberang perbatasan di Afghanistan. Pemerintah Pakistan percaya bahwa sebuah perbatasan yang dikelola dengan lebih baik, aman dan damai adalah demi kepentingan kedua negara yang telah memberikan pengorbanan fenomenal dalam perang melawan terorisme.

Namun Reece Jones, profesor departemen Geografi di Universitas Hawaii berpendapat bahwa pagar perbatasan gagal mencegah lintas batas terorisme dan untuk melindungi penduduk dari ancaman eksternal. Menurut Organisasi Migrasi Internasional, lebih dari 10.000 orang tewas karena berusaha menyeberangi perbatasan sejak awal 2015. Jones berpendapat kematian ini terkait langsung dengan penerapan strategi pencegahan dan pembangunan tembok di perbatasan. Sementara tembok dan pagar perbatasan dibangun di Asia Selatan dan seluruh dunia efektif sebagai simbol yang menunjukkan bahwa politisi melakukan sesuatu untuk mengatasi ancaman yang dirasakan yang dibawa oleh gerakan yang

tidak sah. Ancaman yang dirasakan ini bisa merupakan ancaman ekonomi.²⁶

Teknologi yang terus berkembang, seperti teknologi informasi, termasuk teknologi persenjataan menyebabkan perbatasan teritorial harus diredifinisi. Dengan berkembangnya teknologi informasi serangan dari luar tidak harus melewati perbatasan teritorial. Serangan *cyber* seperti penyebaran virus ke server-server pertahanan maupun server-server bisnis dan layanan masyarakat bisa dilakukan dari manapun di seluruh dunia. Juga serangan terhadap sistem teknologi informasi perbankan nasional yang bisa mengancam perekonomian nasional sebuah negara bisa dilancarkan dari luar negara tersebut.

Dengan berkembangnya teknologi informasi yang menghubungkan secara massal warga negara suatu negara dengan warga negara di negara-negara lain seperti media sosial (Facebook, WhatsApp, Telegram, BlackBerry Messenger) menyebabkan batas-batas teritorial antar negara hilang. Penduduk dunia bisa berkomunikasi dan bertukar informasi secara *realtime*, tidak memerlukan *exit-permit* dari negara-negara bersangkutan. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini maka tantangan pertahanan nasional suatu negara juga makin kompleks, jauh lebih kompleks daripada tantangan pertahanan di perbatasan teritorial. Di dunia teknologi informasi, perbatasan nasional sebuah negara harus didefinisikan lagi. Teknologi informasi dianggap ancaman nyata.

Tetapi di sisi lain, dengan mulai bergejolaknya geopolitik kawasan-kawasan dunia, perbatasan teritorial tetaplah penting. Walter Russel Mead menulis *essay*, dalam judul yang provokatif: *The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Powers*. Berikut ini kutipannya:

“Sejauh ini, tahun 2014 telah menjadi hari yang penuh gejolak, karena persaingan geopolitik telah

menyerbu kembali ke panggung utama. Entah itu pasukan Rusia yang merebut Krimea, Tiongkok yang membuat klaim agresif di perairan pesisirnya, Jepang yang merespon dengan strategi yang semakin asertif, atau Iran yang mencoba menggunakan aliansi dengan Suriah dan Hizbullah untuk mendominasi Timur Tengah, kekuatan kuno memainkan kembali perannya dalam hubungan internasional. Amerika Serikat dan Uni Eropa setidaknya menemukan *trend* seperti itu yang mengganggu. Keduanya lebih suka memindahkan masalah geopolitik di wilayah dan kekuatan militer dan lebih fokus pada tatanan dunia dan tata kelola global: liberalisasi perdagangan, non-proliferasi nuklir, hak asasi manusia, peraturan hukum, perubahan iklim, dan sebagainya. Memang, sejak berakhirnya Perang Dingin, tujuan terpenting dari kebijakan luar negeri Amerika Serikat dan Uni Eropa adalah untuk mengalihkan hubungan internasional jauh dari masalah *zero-sum* ke negara-negara yang *win-win* untuk diseret kembali ke kontes sekolah tua seperti di Ukraina tidak hanya mengalihkan waktu dan energi dari masalah penting tersebut. Hal itu juga mengubah karakter politik internasional. Seiring suasananya berubah menjadi gelap, tugas mempromosikan dan memelihara tatanan dunia tumbuh semakin menakutkan. Tapi orang-orang Barat seharusnya tidak pernah mengharapkan meninggalkan teori geopolitik kuno. Mereka melakukannya hanya karena mereka secara fundamental salah membaca apa yang dimaksud dengan runtuhnya Uni Soviet: kemenangan ideologis demokrasi kapitalis-liberal atas komunisme, bukan keusangan dari kekuatan super. Tiongkok, Iran, dan Rusia tidak pernah membeli penyelesaian geopolitik yang mengikuti Perang Dingin, dan mereka berusaha keras untuk membatalkannya. Proses itu tidak akan damai, dan apakah revisionisnya berhasil, usaha

²⁶ Rene Jones (2012). *Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel*. Paperback.

mereka telah mengguncang keseimbangan kekuasaan dan mengubah dinamika politik internasional”.²⁷

Tulisan ini mengingatkan betapa pentingnya kembali lagi perhatian pada strategi pertahanan konvensional dengan tekanan pada perbatasan teritorial di tengah teknologi informasi yang berkembang pesat. Bagaimanapun bangkitnya geopolitik di banyak kawasan di dunia menekankan kembali betapa penting pertahanan di garis pertahanan, terutama setelah peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti digambarkan di atas dan peristiwa-peristiwa pendudukan ISIS atas wilayah-wilayah Irak dan Suriah dengan kekeerasan yang brutal yang menyebabkan ratusan ribu kematian, juga masifnya kasus-kasus perkosaan, perbudakan seksual, pengusiran dan pembasmian etnis, pemaksaan anak-anak menjadi tentara dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia berat lainnya di kawasan itu.

Geopolitik telah mendorong terorisme global, *cross border terrorism* menjadi *trend* yang tidak terhindarkan. Wilayah perbatasan dua negara seringkali menjadi basis pertahanan dan aktifitas *cross border terrorism* ini. Taliban Pakistan atau Tehrik-i-Taliban Pakistan adalah salah satu contoh kelompok yang digolongkan sebagai kelompok teroris oleh Pemerintah Pakistan. Taliban Pakistan adalah organisasi yang memayungi beberapa kelompok militan Islam yang berbasis di barat laut Wilayah Kesukuan Federal di sepanjang perbatasan Afganistan dan [Pakistan](#). Kelompok ini didirikan pada Desember 2007 di mana sekitar 13 kelompok perlawanan berbasis [jihad](#) Islam bersatu di bawah pimpinan Baitullah Mehsud untuk membentuk Tehrik-i-Taliban Pakistan. Tahrik-i-Taliban Pakistan memiliki keterkaitan dengan Taliban Afganistan, mereka juga beroperasi di

Afganistan dan Taliban Afganistan juga melintas batas ke Pakistan.²⁸

Pada 16 Desember 2014, enam pria bersenjata dari kelompok [Tehrik-i-Taliban Pakistan](#) menyerang Sekolah Umum milik Angkatan Darat Pakistan di kota [Peshawar, Pakistan](#), dan menyandera staf sekolah beserta murid-muridnya. Lebih dari 145 orang, kebanyakan di antaranya anak-anak berusia antara 10 sampai 18 tahun tewas dan 114 lainnya luka-luka. [Tehrik-i-Taliban Pakistan](#), bertanggung jawab atas serangan ini dan mengatakan bahwa serangan tersebut adalah pembalasan bagi [Operasi Zarb-e-Azb, serangan angkatan darat Pakistan di Waziristan Utara](#) yang dimulai pada musim panas 2014. Waziristan adalah wilayah Pakistan Barat laut yang berbatasan dengan Afganistan, basis Taliban Pakistan dan Taliban Afganistan. Pesawar adalah ibukota provinsi yang berdekatan dengan perbatasan Afganistan. Sebelumnya tahun 2012, [Tehrik-i-Taliban Pakistan](#) menembak kepala Malala Yousafzai seorang murid sekolah dan aktivis pendidikan dan hak-hak perempuan di kota [Mingora](#) di [Distrik Swat](#) provinsi [Khyber Pakhtunkhwa](#). Tapi Malala selamat. Taliban melarang anak perempuan mengenyam pendidikan. Tapi Malala menentangnya. Distrik Swat di Timur Laut Pakistan juga wilayah dekat perbatasan Afganistan yang dikontrol Taliban Pakistan.

Bagaimana ilmu-ilmu sosial menjelaskan dan bagaimana mengkaji kedua peristiwa memilukan yang merupakan implikasi dari aktifitas *cross border terrorism* di perbatasan Pakistan dan Afganistan tersebut? Tentu tidak hanya dengan pendekatan Geopolitik, itu tidak cukup untuk menjawab persoalan, dua peristiwa di wilayah perbatasan Pakistan-Afganistan tersebut. Dua peristiwa itu didorong oleh motif-motif yang dilatarbelakangi masalah-masalah politik, sosial, ekonomi, geopolitik, persepsi tentang ideologi, agama, budaya, dan gender, hubungan internasional, hukum nasional, hukum internasional, pertahanan dan keamanan. Demikian pula masalah

²⁷ Walter Russel Meae (2018). The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Powers, essay. *Foreign Affairs*, Volume 97, Number 1, Januari/February.

²⁸ Rahimullah Yusufzai (2008). A Who's Who of the Insurgency in Pakistan's North-West Frontier Province: Part One – North and South Waziristan. *Terrorism Monitor* 6 (18).

cross border terrorism bukanlah hanya masalah pertahanan dan keamanan semata, namun juga melibatkan masalah-masalah yang sudah disebut tadi. Semua pendekatan ilmu tersebut saling berkaitan: bagaimana Taliban Pakistan tega membunuh anak-anak secara keji, mengapa mereka melarang anak-anak perempuan bersekolah, mengapa Malala melawan dengan risiko dibunuh, bagaimana pengaruh para ulama Islam Pakistan menyelamatkan Malala dan keluarganya dengan fatwa yang mereka terbitkan atas percobaan pembunuhan tersebut, bagaimana Taliban Pakistan menjalin hubungan yang erat dengan Taliban Afganistan, dan bagaimana mereka bisa mengontrol perbatasan Pakistan-Afganistan dibutuhkan banyak bidang kajian ilmu.

Hal serupa bisa dikemukakan di Marawi: apakah pendudukan Marawi oleh kelompok teroris Maute hanya merupakan masalah pertahanan dan keamanan Filipina? Teledor menjaga perbatasan dan keamanan Kota Marawi? Tentu ilmu pertahanan dan keamanan tidak cukup sehingga dibutuhkan banyak ilmu untuk mengkajinya: mengapa bisa terjadi, bagaimana mengatasi dan bagaimana mencegahnya. Itu tugas kajian multidisiplin.

Kesimpulan

Radikalisme mula-mula adalah aliran yang digunakan oleh kaum revolusioner nasional di dunia Barat untuk merebut kekuasaan politik, demikian juga aliran yang digunakan oleh kaum nasionalis anti kolonial kemudian digunakan oleh para aktivis sosial untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Namun dalam perkembangannya

radikalisme digunakan oleh kelompok-kelompok miitan yang mendasarkan dirinya pada inteprasi agama. Radikalisme seperti ini dimulai di Timur Tengah, namun kemudian menyebar secara global hingga ke Indonesia. Di Timur Tengah mula-mula radikalisme muncul dalam perjuangan para aktivis kemerdekaan Palestina yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai perjuangan kemerdekaannya. Dari radikalisme gerakan kemerdekaan Palestina jenis-jenis dan tipe-tipe radikalisme berkembang dan digunakan untuk tindakan-tindakan terorisme dengan berbagai alasan, latar belakang dan tujuan masing-masing.

Radikalisme beradaptasi di mana kelompok-kelompok radikal itu berkembang. Radikalisme di Indonesia muncul dengan latar belakang yang berdeba dengan radikalisme yang muncul di Filipina misalnya, atau di Irak dan Suriah, walaupun mungkin gerakan radikalismenya bersumber pada ideologi dan ajaran yang sama. Masing-masing radikalisme ,memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda. Radikalisme di Filipina misalnya digabungkan dengan cita-cita kelompok sparatis Muslim memisahkan diri dari wiayah Filipina yang mayoritas pemeluk Katolik sementara radikalisme di Indonesia digunakan untuk tujuan-tujuan politik mengubah dasar dan bentuk negara yang mereka cita-citakan. Dalam masyarakat multikultural, radikalisme bisa tumbuh subur karena berbagai sebab, sebab utamanya adalah pertentangan dalam masyarakat multikultural itu sendiri dan peran negara yang lemah dalam menjaga keamanan dalam negeri dan p[ertahanan dari gelombang kedatangan ideologi-ideologi radikal dari luar negeri.

Daftar Pustaka

- Amjad, Maria (2017). Cross-Border Terrorism, Migration and Human Trafficking: The Rise of Border Walls in South Asia. <http://moderndiplomacy.eu>.
- Beck, Colin J. (2015) *Radicals, Revolutionaries, and Terrorists*, Polity Press 65 Bridge Street Cambridge CB2 1UR, UK
- Cross, Remy dan David A. Snow "Radicalism within the Context of Social Movements: Processes and Types." *Journal of Strategic Security* 4, no. 4 (2012): : 115-130.
- Castells, Manuel (1997), *The Power of Identity*, Blackwell Publishing.
- Dorpalen, Andreas (1984). *The World of General Haushofer*. Farrar & Rinehart, Inc., New York
- Ganesh, Shiv, Heather Zoller, George Cheney. (2005) Transforming Resistance, Broadening Our Boundaries: Critical Organizational Communication Meets Globalization from Below. *Communication Monographs* 72:2, pages 169-191.
- Geertz, Clifford, *Welt in Stuecken*. Kultur und Politik am Ende des 20 (1996) , Jahrhunderts Passagen-Verlag, Wienm.
- Guzman-Concha, Cesar (2015). Radical Social Movements in Western Europe: A Configurational Analysis. *Social Movement Studies* 14:6, pages 668-691.
- Gyorgy, Andre (1944). *Geopolitics, the new German Science.*, University of California publication in international relations.
- Hanita, Margaretha (2002). "Strategi Pertahanan di Wilayah Perbatasan dengan Negara Tetangga dalam Persepektif Ketahanan Nasioanal, Studi Kasus Daerah Perbatasan di Kalimantan, Papua dan Timor Barat". Tesis, Program Pasca Sarjana Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia.
- Herwig, Holger H (2016). *The Demon of Geopolitics, How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess*. Rowman & Littlefield Publisher.
- _____, (1999). Geopolitic: Haushofer, Hitler and Lebensraum. *Journal of Strategic Studies*, Volume 22.
- Hull, Sonia Saldívar (2000). *Feminism on the Border: Chicana Gender Politics and Literature*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- _____,(1991). Feminism on the Border: From Gender Politics to Geopolitics dalam Hector Calderon dan Jose Davod Saldivar (1991). *Criticism in the Borderlands, Studies in Chicano Literature, Culture and Ideology*. Duke University Press.
- Jones, Rene (2012). *Border Walls: Security and the War on Terror in the United States, India, and Israel*. Paperback.
- Kellas, James G.(1998), *The Politics of Nationalism and Ethnicity*, St Martin's Press, Inc.
- Koehler, Daniel. (2015) Contrast Societies. Radical Social Movements and their relationships with their target societies. A theoretical model. *Behavioral Sciences of Terrorism and Political Aggression* 7:1, pages 18-34.
- Kymlicka, Will (2003). *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*, LP3ES, Jakarta.
- Lee Wrenn, Corey, Rob Johnson. (2013) A Critique of Single-issue Campaigning and the Importance of Comprehensive Abolitionist Vegan Advocacy. *Food, Culture & Society* 16:4, pages 651-668.
- MacNeil, Rory (2017). Marawi: Behind the Headlines, How did Marawi become the center of a crisis and what needs to be done next? www.thediplomat.com, 31 Agustus.

Meae, Walter Russel (2018), *The Return of Geopolitics, The Revenge of the Revisionist Powers*, essay, *Mahajah Foreign Affairs*, Volume 97, Number 1, Januari/February.

MacNeil, Rory (2017). Marawi: Behind the Headlines, How did Marawi become the center of a crisis and what needs to be done next? www.thediplomat.com, 31 Agustus.

Meyer, Katherine, Linda Lobao. (2003) Household, Gender, and Political Responses to Economic Downturn: Extending Theories of Mobilization. *The Sociological Quarterly* 44:2, pages 159-179.

Naples, Nancy A. and Jennifer Bickham Mendez (ed) (2014). *Border Politics Social Movements, Collective Identities, and Globalization*. New York University Press.

Paasi, Anssi (2005). *Border Studies on the Move*. Routledge Taylor and Francis Inc.

Ronzkowiski, Michel R. (2006). *Terrorism and Organized Hate Crime, Intelligence Gathering, Analysis and Investigation*. CRC Press.

Rosenberg, Matt (2017). What Is Mackinder's Heartland Theory? This mostly outdated theory focused on the role of Eastern Europe. <https://www.thoughtco.com/> 31 Maret.

Trenin, Dmitri (2002). *The End of Eurasia: Russia on the Border Between Geopolitics and Globalization*. Carnegie Endowment for Int'l Peace, Washington DC.

Williams, Dana. (2011) Why revolution ain't easy: violating norms, re-socializing society. *Contemporary Justice Review* 14:2, pages 167-187.

Yusufzai, Rahimullah (2008). A Who's Who of the Insurgency in Pakistan's North-West Frontier Province: Part One – North and South Waziristan. *Terrorism Monitor* 6 (18).